

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agar pembangunan tersebut dapat berjalan maka perlu perhatian dalam masalah pembiayaan dalam pembangunan tersebut.

Pajak merupakan salah satu komponen dalam penerimaan negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar sebagai sumber penerimaan dalam APBN. Kontribusi penerimaan pajak bagi APBN pada tahun 2012 mencapai 78,89% (Sumber: Data Pokok APBN 2005-2012 Depkeu RI) bagi APBN. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan negara ini membutuhkan partisipasi yang besar dari masyarakat sebagai warga negara karena pajak berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Pemerintah melakukan upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan dan peraturan perpajakan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan pendapatan yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan dalam pembiayaan pembangunan ditunjang oleh besarnya sumber dana yang dimiliki. Peran pajak sebagai sumber pendapatan negara juga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Peran Penerimaan Pajak bagi Penerimaan Dalam Negeri
Tahun 2005-2012

Tahun	Penerimaan Pajak (miliar Rp)	Penerimaan Dalam Negeri (miliar Rp)	Kontribusi
2005	347.031,1	493.919,4	70,26%
2006	409.203	636.153,1	64,32%
2007	490.988,6	706.108,3	69,53%
2008	658.700,8	979.305,4	67,26%
2009	619.922,2	847.096,6	73,71%
2010	723.306,7	992.248,5	80,12%
2011	878.685,2	1.165.252,5	75,40%
2012	1.019.332,4	1.292.052,6	78,89%

Sumber: Data Pokok APBN 2005-2012 Depkeu RI, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan negara dari sektor pajak relatif stabil perannya bagi penerimaan dalam negeri sehingga menimbulkan kondisi APBN yang sehat. Peran dan kontribusi penerimaan pajak dari tahun ke tahun kian signifikan sebagai sumber penopang pembiayaan APBN. PPh merupakan komponen penerimaan negara terbesar diantara penerimaan pajak yang ada, sehingga melalui PPh dapat dilihat efektif tidaknya penerimaan itu sendiri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, melalui Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan pelaksanaan pemungutan PPh tersebut, perlu diterapkan pengendalian intern yang efektif pada Kantor Pelayanan Pajak.

Menurut Pandiangan (2010:29), **efektivitas pajak merupakan upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dengan berbagai jenis dan sistem pengenaan.**

Efektivitas penerimaan pajak dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, yaitu dengan melihat perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan pajak.

Efektivitas penerimaan pajak penghasilan didukung oleh efektif tidaknya penerapan pengendalian intern. Berdasarkan revisi AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) periode 1 Januari 1997 dalam Amin Widjaja (2013:33)

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan pada hal-hal berikut ini:

1. Keandalan pelaporan keuangan;
2. Efektivitas dan efisiensi operasi; dan
3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pencapaian tujuan pengendalian intern terlihat adanya keterkaitan efektif tidaknya penerimaan pajak, yang juga didukung oleh penerapan pengendalian intern. Hal ini dilihat dari reformasi perpajakan dan perluasan basis wajib pajak yang potensinya masih sangat besar sehingga membutuhkan penerapan pengendalian intern untuk mencapai target penerimaan pajak penghasilan.

Beberapa hasil penelitian empiris sebelumnya terkait dengan pengendalian intern dan efektivitas penerimaan pajak penghasilan antara lain:

Tabel 1.2 Ringkasan Peneliti Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	RINI NURDIANI (2009)	PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA BANDUNG	Metode deskriptif dengan pendekatan survey. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan dengan studi lapangan melalui kuesioner dan wawancara serta melakukan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang akan dikuantitatifkan dengan menggunakan skala ordinal dan metode likert, yang kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis regresi sederhana.	Adanya koefisien regresi sebesar 8,268 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,002, maka diperoleh keputusan uji Ho di tolak dan hipotesis alternatif diterima, yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah.
2.	TIA NETRIANA (2009)	PENGARUH PENGENDALIAN INTERN TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui kuesioner terhadap 90 orang pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan. Pengujian hipotesis dengan teknik statistik parametrik menggunakan model regresi linier sederhana.	Adanya pengaruh positif dari pengendalian intern terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan melalui persamaan regresi $\hat{Y} = -509,061 + 200,999 X$ dan koefisien determinasi 78,6%. Berdasarkan hasil penelitian dapat

				disimpulkan bahwa semakin baik pengendalian intern dapat mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan.
3.	RORI VIRGO (2005)	PERANAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Survey pada 3 Kantor Pelayanan Pajak Bandung)	Metode deskriptif dengan pendekatan survey penelitian penjelasan dan metode statistik nonparametrik. Data diperoleh melalui kuesioner terhadap 28 orang pegawai pajak pada Seksi Pjak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi, Bandung Tegallega, Bandung Bojonegara. Pengujian Hipotesis dengan uji korelasi <i>Rank Spearman</i> .	Adanya hubungan yang berarti/kuat antara variabel yang diteliti, dimana $r_s = 0,6544$ (koefisien korelasi) dan dengan koefisien determinasi sebesar 42,82%. Hasil pengujian menyatakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $4,4131 > 1,706$ yang berarti terdapat peranan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “menurut pendapat pegawai pajak, pengendalian intern memiliki peranan yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi”.
4.	MARYANI (2011)	PENGARUH PENGENDALIAN INTERN INSTANSI PERPAJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS	Metode deskriptif dengan pendekatan studi survey. Data diperoleh melalui kuesioner terhadap 15 orang pegawai	Hasil pengujian menyatakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,36 > 1,771$, dengan demikian menunjukkan hasil

		<p>PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN (Studi survey pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees)</p>	<p>pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees. Pengujian Hipotesis dengan uji korelasi <i>Rank Spearman</i>.</p>	<p>bahwa t_{hitung} berada diluar daerah penerimaan hipotesis 0 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$. Nilai <i>significance</i> adalah sebesar 0,005 atau lebih kecil dari 0,005. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Koefisien determinasi sebesar 63,36% itu artinya bahwa perubahan pada efektivitas penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees dipengaruhi oleh pengendalian intern.</p>
--	--	---	--	---

Berdasarkan kajian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di tiga KPP Pratama wilayah kota bandung dengan **Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan (Survei Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, wilayah kota Bandung.

2. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, wilayah kota Bandung.
3. Apakah terdapat pengaruh antara penerapan sistem pengendalian intern dengan efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak, wilayah kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pada Kantor Pelayanan Pratama di wilayah kota Bandung.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, wilayah kota Bandung.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan sistem pengendalian intern dengan efektivitas penerimaan pajak penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi penulis
Memberikan gambaran dan informasi mengenai efektivitas suatu pengendalian intern dan hubungannya dengan tercapainya penerimaan pajak yang efektif.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pada KPP Pratama wilayah kota Bandung dan bagaimana hubungannya dengan efektivitas

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti lainnya yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.